

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah telah membuktikan bahwa gerakan mahasiswa serta institusi perguruan tinggi merupakan motor penggerak perubahan politik di Indonesia, mahasiswa senantiasa menjadi garda terdepan perjuangan menuntut perubahan dan melawan segala bentuk penindasan serta penghisapan rakyat. Mahasiswa selalu turut ambil bagian dalam berbagai aksi menuntut transformasi demokratik untuk mengubah nasib bangsanya, sejak zaman pra kemerdekaan hingga usia bangsa ini telah melampaui setengah abad. Berbagai gerakan yang dipelopori mahasiswa ini telah tercatat dalam tinta emas perjalanan bangsa ini.

Seperti apa yang telah dipostulatkan oleh Huntington,¹ bahwa gerakan mahasiswa ialah "*The Universal Opposition*" terhadap bentuk kezaliman yang selama ini dilakukan oleh institusi Negara, betapa pentingnya peran mahasiswa sebagai kekuatan oposisi di tengah masyarakat sipil, maka ketika berbicara perubahan sosial politik, secara jelas juga Huntington menyebutkan peran intelektual perkotaan sebagai kekuatan oposisi yang cenderung permanen, aktif dan sangat penting perannya.

Dalam banyak kasus pengalaman empiris bangsa ini gerakan mahasiswa sering di representasikan sebagai kaum intelektual perkotaan, yang menurut

¹ Mahmud Sidiq, *KAMMI Dalam Pergulatan Reformasi: Kiprah Politik Aktifis Dakwah Dalam*

Anas Urbaningrum², tidak lebih dari kelompok elit terdidik yang secara kuantitas mereka tergolong sangat kecil jumlahnya, namun secara kualitas siapa pun tidak dapat membantah mereka senantiasa menjadi lokomotif dari setiap perubahan yang terjadi di negeri ini, yang mampu membangkitkan kesadaran semua pihak untuk melancarkan tuntutan perubahan politik.

Dari perjalanan sejarah bangsa ini kita tidak dapat membantah bahwa sedemikian besar jasa para mahasiswa terhadap negara ini dengan segala idealismenya, mereka tidak tabu untuk turut terlibat dalam berbagai kegiatan politik, demi sebuah perjuangan dalam menuntut kesejahteraan masyarakatnya walaupun harus mengorbankan jiwa mereka.

Menurut Sri Bintang Pamungkas, ada beberapa karakteristik yang menjadi pendorong utama keterlibatan mereka terhadap dunia politik yaitu:

1. Sebagai kelompok masyarakat yang memperoleh pendidikan terbaik, mahasiswa memiliki horizon yang kuat diantara keseluruhan masyarakat Indonesia untuk lebih mampu bergerak diantara yang lainnya.
2. Sebagai kelompok masyarakat yang paling lama menduduki bangku sekolah, mahasiswa telah mengalami proses sosialisasi politik terpanjang.
3. Kehidupan kampus membantu gaya hidup yang sangat unik di kalangan mahasiswa, karena universitas merupakan salah satu tempat terjadinya akulturasi sosial dan budaya.

² Anas Urbaningrum, *Kepeloporan Mahasiswa Tidak Sia-Sia Dalam Mahasiswa Menggugat* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999) Hal 45

4. Mahasiswa sebagai kelompok yang akan memasuki lapisan atas dari susunan kekuasaan, struktur perekonomian serta prestise dalam masyarakat.

Dari faktor-faktor inilah kemudian mahasiswa dan kampus menjadi tempat bertemunya latar belakang sosial budaya, yang akhirnya menjadi tempat yang efektif dalam membangun idealisme seorang mahasiswa, kampus juga kemudian menjadi sosialisasi politik yang sangat efektif terhadap diri seorang mahasiswa. Dari hal inilah di kemudian hari memunculkan eskalasi gerakan massa yang sangat massif serta radikal bahkan tidak berlebihan dikatakan sangat revolusioner, ketika kran-kran kebebasan dibungkam serta nilai-nilai keadilan ditutup rapat-rapat oleh pihak penguasa. Maka pilihan untuk bergerak serta melawan menjadi sebuah keniscayaan.

Dalam prespektif ke Indonesiaan sejarah telah membuktikan bahwa mahasiswa senantiasa berdiri pada garda terdepan dalam tiap perubahan yang terjadi, kita mungkin tidak akan pernah lupa bagaimana peranan Budi Utomo sebuah perkumpulan mahasiswa sekolah STOVIA, dalam perjuangan kemerdekaan melalui jalur organisasi. Sebagai salah satu gerakan yang lahir dari rahim intelektual kampus, Budi Utomo kemudian dicatat menjadi pionir serta titik awal pergantian arah perjuangan kemerdekaan, dari bentuk tradisional melalui kekuatan fisik beralih pada perjuangan dalam bentuk modern melalui jalur organisasi.

Perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak hanya berlangsung di dalam

dan pengakuan dari negara lain, dan sebagai pertanda bahwa perjuangan Indonesia untuk lepas dari penjajahan akan tetap eksis sampai tujuan itu tercapai. Disinilah mahasiswa kembali menunjukkan peran sertanya sebagai bagian dari bangsa. Mahasiswa Indonesia yang menuntut ilmu diluar negeri tidak menyia-nyiaakan keberadaan mereka diluar negeri untuk menyiarkan perjuangan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok dunia. Sebagian besar dari mereka yang menuntut ilmu di negeri Belanda akibat kebijakan politik etis yang dilaksanakan pemerintah kolonial Belanda kemudian membentuk Perhimpunan Indonesia, yang kemudian hari banyak melahirkan negarawan-negarawan yang sangat populis serta demokrat.

Pada tahun 1928, para pemuda Indonesia yang tersebar dalam berbagai organisasi kepemudaan yang bersifat kedaerahan membulatkan tekad untuk menyatukan persepsi dan pikiran dalam satu kesatuan, dalam berbingkai keIndonesiaan. Deklarasi runtuhnya egoisme kedaerahan dalam satu tanah air, satu bangsa serta satu bahasa kemudian kita kenal sebagai sumpah pemuda, yang kita peringati tanggal 28 Oktober setiap tahunnya. Ikrar persatuan para pemuda, termasuk di dalamnya mahasiswa, seakan menjadi penyemangat bagi perjuangan kemerdekaan bangsa selanjutnya.

Pendeklarasian kemerdekaan Indonesiapun, yang dipercepat sebenarnya tidaklah lepas dari campur tangan para pemuda dan mahasiswa yang saat itu mempunyai sifat dan watak yang sangat progresif dan revolusioner. Maka

.....

Ketika Bung Karno, salah satu proklamator kemerdekaan Indonesia, mulai menunjukkan gejala otoriter serta kediktatoran sebagai akumulasi ketidaksabaran dalam menyelesaikan permasalahan bangsa, mahasiswa tidak segan-segan untuk turun kejalan untuk menuntun perubahan serta pergantian rezim. Hari-hari penuh heroik itu kemudian dikenang sebagai lahirnya suatu gerakan yang terkenal dengan sebutan angkatan 66.

Rezim Orde Baru yang menggantikan Orde Lama pimpinan Soekarno, kemudian hari telah menjadi sebuah harapan baru. Namun yang terjadi kemudian sebaliknya, Orde Baru dibawah kendali Soeharto ini, kemudian jauh lebih parah dari rezim yang digantikannya. Pembangunan yang digalakkan ternyata hanya dirasakan oleh segelintir orang dilingkar kekuasaan saja, sedangkan rakyat kebanyakan hanya menjadi objek pembangunan yang sama sekali tidak punya peran yang sangat aktif dalam penentuan arah kebijakan pembangunan. Penyakit-penyakit sosial seperti korupsi, kolusi dan nepotisme makin menggurita ditubuh birokrat, yang pada akhirnya menyebabkan roda perekonomian terpuruk serta penegakan hukum tergadaikan, kehidupan politik berjalan sangat otoriter, demokrasi sudah mati. Maka sekali lagi mahasiswa menunjukkan eksistensinya sebagai gerakan moral masyarakat.

Dari paparan singkat periodisasi gerakan mahasiswa di atas tersebut ada hal yang perlu di catat bahwa dalam rentang waktu munculnya gerakan mahasiswa, dalam setiap periodenya senantiasa membawa ciri khas serta

dipengaruhi oleh konteks situasi yang terjadi,³ misalnya karakter dalam hal membangun aliansi gerakan, pada gerakan mahasiswa 1966 mahasiswa membangun aliansi kekuatan dengan pihak militer, tapi ini sangat berbeda kemudian dengan gerakan mahasiswa 1974 sampai dengan 1998 yang menganggap pihak militer sebagai penghalang utama tuntutan perubahan yang selama ini di suarakan oleh mahasiswa, mereka menilai posisi militer sangat kontradiksi dengan kekuatan gerakan mahasiswa yang menuntut kehidupan berbangsa serta bernegara yang demokratis. Tentunya dari perbedaan sikap dalam membangun aliansi gerakan sangat ditentukan oleh situasi serta adanya kepentingan yang mempertemukan keduanya. Adapun karakter lainnya yang dimiliki gerakan mahasiswa ialah adanya organisasi yang menjadi penggerak dalam setiap aksi ujuk rasa yang dilakukakan dalam menghadapi penguasa yang di anggap telah mengkhianati arah nilai-nilai demokrasi dan keadilan, pada angkatan 66 kita dengan mudah bisa menyebutkan berbagai organisasi gerakan mahasiswa yang terlibat dalam penggulingan Orde Lama seperti KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia), KAPPI (Kesatuan Pelajar dan Pemuda Indonesia) dan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam).⁴ Ataupun dengan angkatan 74 serta 78 kita bisa menyebutkan Dewan Mahasiswa (DM) sebagai motor penggerak dari aksi-aksi turun kejalan yang dilakukakan. Begitu pula dengan era reformasi di tahun 1998, disini berbagai organisasi gerakan mahasiswa bermunculan dengan banyaknya seperti KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia), FORKOT (Forum Kota), FKSMJ (Forum

³Lihat Adi Suryadi Culla, *Patah Tumbuh Hilang Berganti: Sketsa Pergolakan Mahasiswa Dalam Politik Dan Sejarah Indonesia 1908-1998*. (Jakarta: Rajawali Press, 1998) Hal 57

Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta), FAMRED (Front Aksi Mahasiswa Untuk Reformasi Dan Demokrasi), KOMRAD (Komite Mahasiswa Untuk Reformasi Dan Demokrasi), HAMMAS (Himpunan Mahasiswa Muslim Antar Kampus), FORSAL UI (Forum Salemba) dan sebagainya.

Dari adanya karakter (aliansi gerakan dan organisasi pergerakan mahasiswa) yang senantiasa muncul serta mewarnai dalam setiap eskalasi gerakan mahasiswa dalam setiap periode, tentunya akan diiringi dengan timbulnya suatu polarisasi diantara berbagai kekuatan-kekuatan pendorong perubahan tersebut. Menurut Anas Urbaningrum,⁵ munculnya polarisasi di dalam tubuh gerakan mahasiswa, tidak bisa dipahami begitu saja tanpa melihat bagaimana proses kesejarahan, tradisi-tradisi dan wacana-wacana yang dikembangkan, yang kesemuanya itu berpengaruh secara signifikan terhadap proses pembentukan rumusan penyikapan-penyikapan yang tegas dari setiap kelompok gerakan mahasiswa. Aroma polarisasi ditubuh gerakan mahasiswa sangat kentara sekali terlihat pada periode gerakan mahasiswa pasca kemerdekaan, angkatan 66 yang berhasil menggusur Soekarno dari singgasana kekuasanya, pasca keruntuhan Orde Lama, gerakan mahasiswa dihadapkan pada dua pilihan yang sangat sulit, antara kembali lagi ke kampus sebagai penceminan dari gerakan moral atau terjun dalam politik praktis menjadi anggota parlemen yang mewakili unsur dari mahasiswa, yang berarti menempatkan mahasiswa sebagai gerakan politik. Hal inilah yang kemudian menjadikan adanya polarisasi di kemudian hari, yang melahirkan tokoh-tokoh

antara yang di golongkan sebagai aktifis mahasiswa yang idealis seperti Arif Budiman dan Soe Hoe Gie dengan aktifis mahasiswa yang dianggap pragmatis seperti Akbar Tanjung, Cosmos Batu Bara, Sopyan Wanandi dan Sugeng Suryadi.⁶ Begitu pula yang menimpa gerakan mahasiswa 77-78 yang dianggap sangat fenomenal, sebab untuk pertama kalinya gerakan mahasiswa dizaman Orde Baru ini dengan lantang mengambil sikap menolak kembali Presiden Soeharto sebagai presiden, disaat fondasi kekuatan militer serta kaum teknokrat berdiri dibelakang Soeharto, pada periode ini pula gerakan mahasiswa yang pada waktu itu di mobilisasi oleh Dewan Mahasiswa se-Indonesia, mengalami polarisasi antara DM ITB dengan DM UI.⁷

Polarisasi gerakan mahasiswa pun melanda gerakan mahasiswa pasca Orde Baru, terutama dalam hal penyikapan antar elemen-elemen pergerakan mengenai naiknya BJ Habibie, padahal pada mulanya hampir semua organisasi pergerakan mahasiswa sepakat dalam hal menurunkan reziem Soeharto. Polarisasi ini tidak hanya sampai mengenai pro dan kontra mengenai naiknya Habibie, juga kemudian meluas kemasalah keabsahan Sidang Istimewa MPR pada bulan November 1998, klimaknya pergerakan mahasiswa terpolarisasi terhadap penyikapan Pemilu 1999 antara yang mendukung sebagai sebuah sarana perubahan secara konstitusional diantaranya KAMMI, HMI-DIPO, HAMMAS, IMM dan FORSAL UI serta yang menolak dengan menawarkan Komite Rakyat Indonesia sebagai solusi perubahan sikap ini di tempuh oleh FORKOT, FAMRED, KOMRAD, HMI-

⁶ John Maxwell, *Soe Hoe-Gie: Pergulatan Intelektual Muda Melawan Tirani* (Jakarta: Grafiti Press 2001) Hal 45

MPO, dan FKSMJ⁸ yang saat itu memang dikenal sebagai pergerakan mahasiswa yang berhaluan radikal revolusioner.

Tentunya polarisasi gerakan mahasiswa tidak hanya sampai pada masa BI Habibie berkuasa, pada masa pemerintahan Abdurahman Wahid, bentuk pemerintahan yang merupakan proses “dagang sapi” elit-elit partai Islam dan berbasis massa Islam, yang tergabung dalam koalisi kekuatan poros tengah ini,⁹ perpecahan dikalangan mahasiswa terjadi terutama mengenai pro kontra antara BEM seluruh Indonesia (BEM SI) dan KAMMI di satu pihak dengan BEM Indonesia (BEMI) dan Forkot di pihak lain, KAMMI dan BEM seluruh Indonesia menilai jalannya roda pemerintahan dianggap sudah mengkhianati amanah reformasi yang telah digulirkan oleh mahasiswa, maka Presiden Abdurahman Wahid harus segera diberhentikan terlebih bersamaan dengan isu menghangatnya kasus Bulog dan Berunai, sedangkan BEM Indonesia menilai apabila gerakan mahasiswa terjebak dalam isu menggulirkan penurunan Presiden Abdurahman Wahid maka gerakan mahasiswa sudah tidak berpijak pada gerakan moral lagi tapi sudah mengarah pada kepentingan pragmatisme politik, atau dalam kata lain terjebak dalam pusaran konflik elit politik semata.

Hanya pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putrilah kekuatan gerakan mahasiswa mengalami “*penyatuan isu*” kembali, mereka tidak lagi terjebak ke dalam polarisasi gerakan, yang sebenarnya bisa melemahkan gerakan mahasiswa itu sendiri dalam melakukan pengawalan transisi demokrasi di negeri ini, hampir semua gerakan mahasiswa sepakat bahwa

⁸ Adi Suryadi Culla, *op.cit.* Hal 200

pemerintahan Mega-Hamzah telah gagal membawa bangsa ini kearah yang lebih baik, maka dari itu perlu ada suksesi kepemimpinan nasional secara revolusioner. Akan tetapi kemudian penyatuan isu ini hanya bertahan seumur jagung yang hanya tertuang dalam *manifesto oposisi kaum muda* yang menyatukan hampir semua pergerakan mahasiswa baik yang selama ini sering dilabeli sebagai gerakan mahasiswa yang berhaluan kiri radikal maupun pergerakan mahasiswa moderat keritis yang sering diresprentasikan golongan kanan religius ke dalam *mainstream* yang sama, tapi kemudian ketika gerakan mahasiswa dihadapkan pada realitas politik yang terjadi, bahwa pemerintahan Mega-Hamzah tidak bisa turunkan begitu saja seperti menurunkan Soeharto ditengah jalan, pemerintahan ini sangat kuat sebab didukung oleh simpul-simpul legitimasi politik, misalnya figur Megawati yang masih didukung mayoritas masyarakat dinegri ini, sebab melalui Pemilu 1999 PDI-Perjuangan yang menjadi kendaraan politiknya untuk menduduki posisi Presiden Republik Indonesia, memenangkan suara manyoritas. Ditambah dengan semakin dekatnya agenda Pemilu 2004, gerakan mahasiswa akhirnya mengalami polarisasi kembali, ada yang menganggap bahwa dengan pelaksanaan Pemilu 2004 yang memakai sistem yang sama sekali baru dari pemilu-pemilu sebelumnya, maka perubahan politik yang signifikan bisa terjadi dinegri ini hal ini didukung sepenuhnya oleh KAMMI¹⁰ dan BEM Seluruh Indonesia¹¹ dengan alasan bahwa masyarakat dapat memilih secara langsung wakil-wakilnya, maka akan jauh dari konspirasi elit politik, tapi

¹⁰ Wawancara Penulis dengan Mungki Rahadian (Ketua KAMMI Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2002-2004) di Masjid Kampus UGM, tanggal 20 juli 2004.

¹¹ Wawancara Penulis dengan Farizal (Presiden BEM UMY 2003-2004) yang hadir dalam

dipihak lain gerakan mahasiswa seperti LMND, FMN, HMI-MPO serta GEMA PEMBEBASAN,¹² menilai bahwa pemilu 2004 tidak akan membawa perubahan yang sangat berarti walau sistem yang dipakai sama sekali baru, sebab elit-elit politik yang bermain masalah orang-orang lama, yang selama ini dinilai pendukung stastus quo,¹³ maka tawaran mereka hanya transformasi yang berwatak radikal revolusionerlah yang mampu membawa bangsa ini kearah yang lebih baik. Dari polarisasi kedua kutub yang berlawanan inilah yang mengakibatkan kekuatan oposisi pergerakan mahasiswa terbelah serta sulit untuk disatukan kembali kedalam satu isu yang sama.

Dari paparan ini kita dapat menyimpulkan bahwa polarisasasi gerakan mahasiswa dari masa kemasa telah menjadi suatu keniscayaan sejarah yang tidak dapat *dinegasi* lagi, dari munculnya fenomena tersebut penulis mencoba menggambarkan serta menganalisis faktor apa saja yang menjadi penyebab munculnya polarisasi gerakan mahasiswa tersebut, tentunya tidak mungkin penulis melakukan analisis terhadap semua polarisasai gerakan mahasiswa yang pernah terjadi dari masa kemasa, penulis hanya membatasi ruang lingkup terhadap polarisasai yang terjadi pasca Orde Baru dengan studi kasus pada presfektif dua organisasai pergerakan mahasiswa yakni, antara KAMMI dengan HMI-MPO terhadap pemilu 2004, mengingat kedua organisasi ini berbeda dalam menyikapinya.¹⁴ Alasan lain penulis mengambil KAMMI dengan HMI-MPO sebagai bahan penelitian karena adanya kesamaan diantara

¹² Untuk nama pergerakan mahasiswa yang terakhir, mereka adalah organ gerakan baru yang pada saat diskusi di Kampus UGM (Fakultas Peternakan) tanggal 20 Juli 2004, mereka mengkritisi Pemilu secara radikal, walau tidak terang-terangan melakukan aksi penolakan terhadap pemilu2004. namun secara ekspilisit menanyakan mangfaat dari dilaksanakanyaPemilu 2004.

keduanya. *Pertama*, keduanya lahir dari rahim perjuangan umat Islam. *Kedua*, mereka secara sosiologis bergerak dibawah tanah ketika reziem Orde Baru berkuasa,¹⁵ jadi secara kultur gerakan mereka dibangun pada fondasi militansi yang sama. *Ketiga*, keduanya sama-sama memakai Islam sebagai landasan ideologi dalam bergerak. Serta *Keempat*, keduanya sama-sama sebagai organisasai pergerakan mahasiswa ekstra kampus yang lebih bisa menyentuh realitas dimasyarakat. Namun mesti diikat oleh berbagai kesamaan ideologis, militansi dalam bergerak serta kelahiran mereka dari rahim perjuangan umat Islam, dan sama-sama bergerak dalam wilayah ekstra kampus, tapi ternyata respon mereka dalam menyikapi Pemilu 2004 berbeda. Adapun objek penelitian penulis memilih Daerah Istimewa Yogyakarta adalah [1] karena selama ini Yogyakarta termasuk pusat gerakan mahasiswa selain kota Bandung dan Jakarta, [2] Yogyakarta menjadi barometer gerakan mahasiswa se-Indonesia, [3] dari kota inilah berbagai organisasi gerakan mahasiswa tumbuh dengan pesat serta dinamis yang mewakili varian ideologi yang beranekaragam. [4] dan dari daerah ini juga, banyak sekali isu-isu gerakan serta wacana pemikiran muncul, yang senantiasa menjadi isu gerakan dalam merespon situasi politik nasional. Mengenai alasan penulis memilih KAMMI Daerah Yogyakarta (KAMDA) sebagai objek penelitian dikarenakan bila dibandingkan dengan KAMMI daerah lain termasuk KAMMI pusat, mereka lebih progresif dilihat dari segi wacana pemikiran serta dalam mengemas isu-

¹⁴ Lihat Majalah Saksi edisi No 18 Tahun V, 17 Juni 2003

¹⁵ Walaupun KAMMI lahir saat menjelang Soeharto runtuh, tapi indentitas gerakan serta internalisasi penguatan secara ideologis sudah berlangsung selama 20 tahun lamanya. Begitu pula

isu politik yang diangkat sebagai bentuk respon gerakan mahasiswa dari situasi politik nasional yang sedang terjadi,¹⁶ walaupun bila dibandingkan dari segi aplikasi aksi demonstrasi jauh lebih dinamis KAMMI Pusat (Jakarta) yang mampu memobilisasai ratusan ribu mahasiswa untuk turun ke jalan, justru dari keistimewaan dalam mengembangkan isu serta pemikiran inilah menjadikan KAMMI Yogyakarta menjadi pusat informasi dari KAMMI daerah lainnya. Sedangkan untuk HMI-MPO cabang Yogyakarta, sebab dari kota inilah untuk pertama kalinya HMI-MPO muncul sebagai reaksi atas kebijakan asas tunggal reziem Soeharto, mereka inilah perintis serta pelopor yang pertama kali dalam membentuk HMI-MPO¹⁷ serta seringnya isu-isu dan wacana pemikiran di lahirkan dari cabang ini, termasuk isu *Sosialisme Religius Suatu Jalan Keempat* dan *Revolusi Sistemik* yang sempat menarik perhatian dunia pergerakan mahasiswa termasuk kalangan akademisi sekaliber Prof. DR. Damarjati Supardjan dan Prof. DR. Frans Magnis Suseno.¹⁸ Untuk itulah penulis lebih tertarik mengambil Daerah Yogyakarta sebagai objek penelitian dua organisasi tersebut.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian di atas, timbul sebuah pertanyaan yang menarik berkenaan dengan hal tersebut. Rumusan masalah penelitian ini adalah: bagaimana

¹⁶ Wawancara penulis dengan Amin Fahrudin, mantan pengurus KAMMI DIY periode 2002-2004 tanggal 25 September 2004.

¹⁷ Lihat Suharsono, *HMI Pemikiran dan Masa Depa*. (Yogyakarta: CIIS Press, 1997)

Menurut Sofyan Effendy: “Teori adalah sarana politik untuk menyatakan hubungan sistematis antara fenomena sosial maupun alamiah yang hendak diteliti, teori adalah rangkaian logis dari satu proposisi atau lebih”¹⁹.

Sedangkan teori menurut Koentjaraningrat: “Teori adalah pernyataan mengenai sebab akibat dan mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala-gejala yang diteliti dengan satu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat”²⁰

Dari dua pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa teori berusaha untuk menjelaskan hubungan antara dua faktor, atau lebih, yaitu fenomena sosial kemasyarakatan dengan fenomena lain di alam.

2. Polarisasi

Polarisasi menurut Anas Urbaningrum adalah suatu perpecahan antara berbagai komponen.²¹ Polarisasi dalam gerakan mahasiswa muktahir, tidak dapat dipahami begitu saja tanpa melihat bagaimana proses kesejarahan, tradisi-tradisi serta wacana-wacana yang dikembangkan, yang kesemuanya itu berpengaruh secara signifikan terhadap proses penyikapan yang tegas di setiap kelompok mahasiswa. Ada beberapa sebab mengapa polarisasi gerakan mahasiswa terjadi, antara lain [1] adanya faktor ideologi-politik yang menjadi inspirasi tiap-tiap kelompok mahasiswa; [2] pilihan tema besar atau dan wacana strategis

gerakan yang menunjukkan adanya skala prioritas gerakan; [3] pilihan-pilihan aliansi gerakan; dan [4] adanya faktor pencitraan terhadap gerakan mahasiswa. Keempat hal tersebut, setidaknya mampu mengkondisikan berbagai kelompok mahasiswa dalam suasana yang konflikual-kompetitif.

Dibawah ini akan diuraikan secara singkat faktor-faktor yang menyebabkan munculnya polarisasi dalam gerakan mahasiswa.²² *Pertama*, faktor ideologi gerakan. Perbedaan ideologi gerakan dalam tubuh gerakan mahasiswa, jelaslah merupakan salah satu faktor pembeda antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Perbedaan ideologi antar gerakan mahasiswa di Indonesia, sama tuanya dengan pertama kalinya gerakan mahasiswa itu muncul, pada kenyataannya fragmentasi ideologi aliran politik di Indonesia, merupakan realitas yang sangat sulit terbantahkan dan sebenarnya telah berlangsung sejak lama. *Kedua*, menyangkut faktor pilihan tema dan keberpihakan sikap [moral dan politik] yang hendak diperjuangkan. Dengan kata lain skala prioritas kepentingan yang hendak diperjuangkan masing-masing kelompok gerakan, nyaris berbeda-beda. Gerakan mahasiswa akan dianggap tidak ada, bila tidak ada isu yang menjadi tema sentral yang disertai dengan penyikapan-penyikapan, keberpihakan yang sangat jelas, serta keberanian yang nyata dalam memperjuangkannya. Pilihan tema besar atau wacana straregis yang dikerucutkan gerakan mahasiswa, setidaknya mencerminkan tingkat skala perioritas yang hendak di capai oleh masing-

masing kelompok. Perbedaan skala prioritas inilah yang mampu menjadi sebuah pemicu konflik yang bersifat lebih terbuka dan terkadang sangat fatal. *Ketiga*, faktor pilihan-pilihan aliansi antar kelompok-kelompok gerakan tidak lepas adanya persamaan kepentingan, selain adanya persamaan ideologi. Persamaan kepentingan atau persamaan dalam konteks penyikapan terhadap sebuah masalah setrategi, bagaimanapun lebih utama untuk dijadikan bahan pertimbangan aliansi tersebut. Dalam beberapa kasus persamaan ideologi, belum tentu akan menghasilkan sebuah bentuk kerjasama yang signifikan satu sama lain, sementara kepentingan yang ada pada masing-masing pihak berbeda. *Keempat*, faktor pencitraan terhadap gerakan mahasiswa, populisme gerakan mahasiswa tidak terlepas dari sejauh mana media massa mencitrakan kebesarannya. Dalam konteks ini media massa mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam membesarkan sebuah gerakan mahasiswa. Objektivitas media massa, dalam konteks liputannya terhadap peran mahasiswa acap kali tidak proporsional, sehingga mampu memberikan citra yang tidak selalu positif bagi mereka. Sedangkan menurut Lik Nurul Paik²³ polarisasi gerakan mahasiswa terjadi disebabkan karena: *Pertama*, kedalam tubuh gerakan mahasiswa telah masuk berbagai kepentingan politik kelompok tertentu yang ingin memanfaatkan tangan mahasiswa untuk mencapai target politiknya. *Kedua*, situasi ini menyebabkan munculnya kepentingan yang semakin beragam dalam tubuh mahasiswa. Ini ditandai oleh munculnya faksi-faksi gerakan dalam tubuh gerakan mahasiswa yang

²³ Lihat Lik Nurul Paik, *Gerakan Mahasiswa: Sebuah Otokratik, Dalam Mahasiswa Menggugat:*

melahirkan beragamnya berbagai tuntutan serta tema politik yang dimunculkan, sebagai akibat kepentingan yang mulai bersifat seketarian dan patron-klien. Yang acapkali akhirnya terjadi aksi saling *men-caunter* isu politik, fenomena tolak-dukung telah menjadikan sebuah isu menjadi wacana yang berkembang dalam tubuh gerakan mahasiswa Indonesia. *Ketiga*, mahasiswa kurang waspada terhadap setiap gerakan politik yang muncul mengatasnamakan perubahan gerakan reformasi. Padahal banyak kelompok yang memakai lalu memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan kelompoknya saja. Akibatnya mahasiswa terjebak oleh permainan politik komonitas lain yang senantiasa memanfaatkan kelengahan kekuatan gerakan mahasiswa. Hal inilah yang mengakibatkan mahasiswa terjebak dalam sebuah polarisasi antar kekuatan mereka sendiri.

3. Gerakan Sosial

Gerakan mahasiswa yang selama ini terlibat dalam proses transformasi demokratik di negeri ini dapat di golongkan sebagai sebuah gerakan sosial, sampai saat ini pemahaman mengenai konsep gerakan sosial dipahami secara berbeda-beda. Menurut Ali Syari'ati²⁴ bahwa gerakan sosial adalah "Sebuah transformasi kesadaran, tentang eksistensi manusia akan memunculkan tanggung jawab baik pada diri sendiri, Tuhan, maupun pada masyarakat". Sedangkan dalam bukunya *Social Movements: An Introduction To Political Sociology*, Habermas mengkonsepkan bahwa gerakan sosial pada dasarnya adalah bentuk perilaku politik kolektif non

kelembagaan yang secara potensial berbahaya karena mengancam stabilitas cara hidup mapan. Sosiolog lainnya, misalkan Fruer cenderung melihat gerakan sosial sebagai “*konflik generasi*”. Sementara Lipset menawarkan analisis sosiologis yang menganggap bahwa gerakan sosial merupakan bagian dari generasi baru yang memperjuangkan pengakuan dan perlunya menentang orang tua atau kemapanan yang selama ini tidak memberi pengakuan kepada mereka. Sementara Maslow menggabungkan analisis psikologis dan struktur, dimana menurutnya gerakan sosial mewakili suatu generasi baru dengan kebutuhan yang tinggi, yang tepatnya karena mereka dalam kesenangan kelas menengah berada dalam posisi mencari nilai pasca materi.²⁵

Dalam nada uraian seperti ini pula, Eric Hoffer secara lebih filosofis menyebut gerakan sosial ini sebagai gerakan yang dicirikan oleh bangkitnya kerelaan pada para anggotanya untuk berkorban sampai mati; kecenderungan untuk beraksi secara kompak; dimilikinya fanatisme, antusiasisme, harapan berapi-api, kebencian, intoleransi, kepercayaan buta, dan kesetiaan tunggal. Menurut Hoffer, gerakan sosial digerakan oleh kaum prustasi yang fanatik atau yang disebut sebagai *The true believers*. Anggota gerakan masa ini diidentifikasi sebagai orang-orang yang tidak puas serta kecewa, yaitu mereka yang tersingkir dalam

²⁵ 2000:11-124

kehidupan, kelompok marginal ditengah masyarakat, hingga kelompok minoritas yang tertekan²⁶.

Dalam rumusan Escobar dan Alvarez, sebagaimana dikutip Fakhri, gerakan-gerakan sosial kontemporer di dunia ketiga lebih mengarah kepada proses transformasi yang lebih luas. Menurut mereka gerakan sosial tidak dapat didefinisikan semata-mata dalam pengertian strategi ekonomi serta sosial; gerakan sosial itu juga harus ditempatkan sebagai domain politik dan budaya.²⁷

Orang-orang yang terlibat dalam gerakan sosial sendiri selalu memiliki pertimbangan-pertimbangan yang bisa diterima oleh akal sehat. Menurut Ferree, sebagaimana dikutip Laode Ida, ciri gerakan sosial dalam perspektif mobilitas sumber daya adalah; 1) bahwa kegiatan gerakan sosial adalah bukan hal yang spontan dan bukan tidak terorganisasi, dan 2) peserta gerakan sosial bukan tidak rasional. Ini menunjukkan bahwa keikutsertaan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu gerakan sosial lebih pada didasari oleh sebuah pilihan-pilihan rasional.²⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa sebuah gerakan sosial akan senantiasa melibatkan individu atau sekelompok orang yang terorganisir secara baik dan rasional untuk melakukan sebuah perubahan yang menyangkut dimensi

4. Gerakan Mahasiswa

Mahasiswa adalah mahluk yang istimewa, mereka ada pada lapisan usia yang memungkinkan untuk senantiasa enerjik dan cocok untuk menjadi pelopor perubahan; secara sosial mereka juga istimewa, mereka memperoleh status elit dalam stratifikasi sosial kemasyarakatan. Mahasiswa juga sering dijuluki sebagai calon intelektual atau juga seringkali sarat dengan predikat "*agent of change*" atau juga disebut "*agent of development*".

Sebagai cendekiawan muda, maka mahasiswa sebagaimana yang dikemukakan oleh Lewis Coher adalah: "Orang-orang yang kelihatannya tidak puas menerima kenyataan sebagaimana adanya, mereka mempertanyakan kebenaran yang berlaku pada suatu saat, dalam hubungan dengan kebenaran yang lebih tinggi dan luas".²⁹

Sedangkan Edward Shill juga membuat perumusan yang serupa, dimana menurut pandangannya, (mahasiswa sebagai) "Kaum cendekiawan adalah orang-orang yang sedang mencari sebuah kebenaran".³⁰

Dengan kedudukannya sebagai cendekiawan seperti diterangkan di atas maka dalam setiap tindakan (mahasiswa sebagai) cendekiawan (muda) tidak boleh diwarnai oleh adanya "*vested interest*", oleh karena itu setiap tindakan atau gerakan yang dilakukan adalah harus berdasarkan komitmen terhadap kepentingan masyarakat.

Dari beberapa konsepsi serta ciri dominan tentang mahasiswa, bahwa yang di sebut mahasiswa adalah mereka yang selama ini menuntut ilmu yang relatif tinggi di univesitas, dibandingkan dengan masyarakat lainnya.

Menurut Arbi Sanit,³¹ mahasiswa sebagai warga masyarakat yang sedang menempuh proses pendidikan tertinggi, maka dengan sendirinya mahasiswa dipandang sebagai warga kaum intelektual. Di dalam golongan kaum cendikiawan itu sendiri, mahasiswa dianggap sebagai pihak yang sedang mempersiapkan diri untuk menjadi warga intelektual yang sepenuhnya.

Ada sebuah kombinasi diantara kesadaran diri sebagai warga kaum cendikiawan dengan pandangan umum terhadap posisi mereka serta harapan dari masyarakat terhadap sumbangsih kaum itelegensia, yang merupakan kekuatan pendorong bagi mahasiswa untuk turut mengemban peran dirinya sebagai golongan intelektual. Berdasar kapasitasnya sebagai kekuatan massa dan pemula, mahasiswa dituntut melaksanakan peran serta fungsi sebagai kaum intelektual. Salah satu fungsi utama yang harus dimiliki oleh mahasiswa ialah mempengaruhi terjadinya perubahan sosial serta memainkan peran-peran politiknya. Apabila kemudian mahasiswa membangun organisasi sebagai alat bagi pelaksanaan fungsi serta peran tersebut, itulah yang kata Arbi Sanit di dalam tulisanya,³² sebagai sebuah perubahan yang sedang diciptakan dalam sebuah gerakan mahasiswa.

Gerakan mahasiswa haruslah bercampur dengan berbagai kekuatan *civil society* yang lain. Mereka menuntut perubahan sistem yang kemudian berubah menjadi sebuah gelombang sejarah berupa runtuhnya kekuatan ekonomi politik yang tidak berpihak kepada masyarakat. Dalam sebuah konstelasi politik, mahasiswa bukanlah kekuatan serta pemain yang paling utama, gerakan mahasiswa berhasil bukan karena mahasiswa sebagai pelaku utamanya, tapi karena adanya koalisi perubahanan terdiri dari berbagai banyak elemen, yaitu kaum reformasi baik dari kalangan militer, teknokrat, intelektual maupaun dari kalangan publik intenasional. Tanpa terbentuknya koalisi yang setrategis, gerakan mahasiswa itu akan berhenti sebagai gerakan mahasiswa bukan gerakan perubahan yang mampu menciptakan sejarah yang baru. Muhammad Fadjroel Racman,³³ dalam tulisannya mengatakan bahwa gerakan mahasiswa adalah sebagai sebuah gerakan moral yang berpretensi bukan pada kalah atau menang, maupun kuat atau lemah, tapi ia berdasarkan pada sepirit perjuangan dalam menegakan kebenaran.

Adapun bentuk-bentuk gerakan mahasiswa,³⁴ antara lain aksi demonstrasi, aksi mogok makan, pengorganisasian kaum petani serta advokasi-advokasi terhadap masyarakat. Demonstasi dilakukan sebagai upaya untuk menunjukkan sikap mahasiswa terhadap suatu hal atau suatu peristiwa yang dilakukan untuk menentang segala kebijakan yang

³³ Mauhammad Fadjroel Racman, *Gerakan Mahasiswa, Reziem Tiani Dan Ideologi Reformasi* (Jakarta: Madani Press, 1999) Hal 45

³⁴ Farizal, *Pola Gerakan Mahasiswa Paca Orde Baru: Studi Deskriptif KAMMI dan BEM dalam*

5. Orde Baru

Cita-cita Orde Baru pertama kalinya dirumuskan secara lengkap dalam seminar angkatan darat ke-2 di Bandung tahun 1966, seminar itu menjadi sangat penting karena kelengkapan atas hasil rumusan tersebut, juga karena peserta seminar itu sendiri yang kemudian menjadi aktor utama dalam perjalanan reziem Orde Baru.

Secara resmi Orde Baru didefinisikan sebagai sebuah “tatanan kehidupan negara dan bangsa yang diletakan kembali pada pelaksanaan kemurniaan terhadap pancasila dan UUD 1945”.

Sedangkan mengenai cuplikan pengertian Orde Baru secara lengkap, sebagaimana dirumuskan dalam seminar itu:

- a. Musuh utama Orde Baru adalah PKI atau pengikut-pengikut Orde Lama.
- b. Orde Baru ialah suatu sikap mental
- c. Tujuan Orde Baru ialah menciptakan kehidupan politik, ekonomi, dan kultur yang dijiwai oleh moral pancasila khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa.
- d. Orde Baru menghendaki pemikiran yang lebih realitis dan pragmatis walaupun tidak meninggalkan idealisme perjuangan.
- e. Orde Baru menghendaki diutamakan kepentingan nasional, walaupun tidak meninggalkan komitmen ideologi perjuangan anti

- f. Orde Baru menginginkan suatu tata susunan yang lebih stabil berdasarkan lembaga-lembaga (institusional), misalnya MPRS, DPR, Kabinet dan Musyawarah) dan tidak, kurang dipengaruhi oleh oknum-oknum yang dapat menimbulkan kultus individu; akan tetapi Orde Baru tidak menolak pemimpin yang kuat dan pemerintahan yang kuat, malahan menghendaki ciri-ciri demikian dalam masa pembangunan.
- g. Orde Baru mengendaki pengutamakan konsolidasi ekonomi dan sosial dalam negeri.
- h. Orde Baru mengendaki pelaksanaan yang sungguh-sungguh dari cita-cita demokrasi politik dan demokrasi ekonomi.
- i. Orde Baru menghendaki suatu tata politik dan ekonomi berdasarkan pancasila, UUD 1945 dan mempunyai prinsip idiil, operasional dalam ketetapan MPRS IV / 1996.
- j. Orde Baru adalah suatu tata politik dan ekonomi yang belum mempunyai kenyataan, yang ada baru suatu iklim yang cukup menguntungkan bagi pertumbuhan Orde Baru ini.³⁷

6. Persepsi

Dalam kenyataanya, sikap seseorang atau sekelompok orang dipengaruhi oleh persepsinya. Persepsi merupakan suatu faktor penentu yang terjadi dalam diri seseorang ataupun sekelompok orang yang akan mempengaruhi dirinya dalam mengambil sebuah keputusan atau melakukan suatu tindakan atas perilaku tertentu, oleh karena itu persepsi

merupakan hasil dari suatu penilaian terhadap objek tertentu. Manusia dalam hal ini sebagai perseptor dalam suatu proses persepsi secara runtut melihat objek sasaran, kejadian atau hubungan antara keduanya, mendengar, menyetujui, merasakan ataupun memahami suatu objek sasaran secara mendalam. Setelah itu perseptor baru mengorganisasi penafsiran dan akhirnya dapat menilai suatu berdasarkan atas suatu pengalaman yang dialaminya.

Menurut Saparinah Saldi,³⁸ batasan persepsi sebagai berikut: "Persepsi seseorang merupakan suatu proses yang aktif dimana memegang peranan bukan hanya stimulan yang mengenalnya, tetapi juga ia sebagai keseluruhan dengan pengalaman-pengalamannya, motivasi dan sikap relevan terhadap stimulan tersebut".

Sedangkan menurut Bimo Walgito,³⁹ batasan persepsi adalah: "Persepsi merupakan proses pengorganisasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu merupakan sesuatu yang berarti serta merupakan aktivitas integral dalam diri individu".

Dari berbagai pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan proses mental dalam memberikan sebuah pandangan terhadap suatu hal atau objek sehingga menghasilkan sikap tertentu dalam diri individu atau suatu kelompok.

³⁸ Saparinah Saldi, *Persepsi Sosial mengenai Perilaku Penyimpangan*, LP3ES. 1989. Hal 67

7. Pemilihan Umum

Dalam Negara demokrasi, salah satu pilar yang membangunnya adalah terjadinya proses pergantian kepemimpinan nasional (suksesi) secara berkesinambungan. Proses pergantian kepemimpinan itu umumnya dilakukan melalui Pemilihan Umum (Pemilu), yang digelar beberapa tahun sekali.

Muhammad Kusnadi dan Harmaily Ibrahim mendefinisikan pemilu sebagai: "Pemilihan umum tidak lain adalah suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat dan karenanya bagi suatu negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokrasi, pemilihan umum itu harus dilaksanakan dalam waktu-waktu tertentu".⁴⁰

Pemilu memiliki arti penting dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat, dan menjadi sebuah sarana bagi rakyat untuk memaksa pemerintah menerapkan kebijakan yang berpihak pada rakyat, seperti dikatakan Bagir Manan, "Pemilihan umum yang dilaksanakan dalam siklus lima tahun sekali merupakan saat atau momentum memperlihatkan secara nyata dan langsung pemerintahan oleh rakyat. Pada saat pemilihan umum itulah semua calon yang ingin duduk sebagai penyelenggara negara dan pemerintahan bergantung sepenuhnya pada keinginan atau kerhendak rakyat".⁴¹

Secara umum pemilu adalah pemberian suara oleh rakyat melalui pencoblosan tanda gambar untuk memilih wakil-wakil rakyat atau anggota

³⁹ Bimo walgito, *Psikologi Sebagai Pengantar*, Andi Offset, Yogyakarta, 1991 Hal 69

2. Data dan Jenis Data

Data adalah segala keterangan atau informasi mengenai segala hal yang berkaitan dengan penelitian, data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.⁴²

Data primer⁴³ yaitu data yang tersusun dalam bentuk langsung seperti wawancara, melalui para pelaku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Sedangkan data sekunder⁴⁴ yaitu data yang tersusun dalam bentuk-bentuk tidak langsung seperti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mencari sumber data penulis mendasarkan pada data primer serta sekunder, data primer adalah data-data hasil dari wawancara konprensi pres dan hasil pertemuan mahasiswa yang telah didokumentasikan oleh masing-masing gerakan mahasiswa, sedangkan dalam data sekunder berupa ulasan ataupun komentar terhadap gerakan mahasiswa.

⁴² 1990:114-15

a. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data dengan cara studi kepustakaan yang bersumber dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan baik itu berupa buku, jurnal ilmiah, surat kabar maupun majalah.

b. Observasi

Pengamatan yang digunakan dalam rangka pengumpulan data penelitian dengan mengamati langsung objek yang akan diteliti yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, yakni mengenai persepsi antara Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dengan Himpunan Mahasiswa Indonesia Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) terhadap Pemilu 2004. Adapun lokasi yang dijadikan sebagai observasi ialah daerah Yogyakarta sebab di kota inilah dua organisasi ini sangat dinamis pergerakannya baik dilihat dari wacana serta isu yang dikembangkan. Selain itu untuk lebih memudahkan penelitian sebab berada dimana penulis tinggal

c. Wawancara

Salah satu metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang digunakan dengan bertanya langsung dengan para aktifis mahasiswa yang terlibat dalam pergerakan mahasiswa, terutama mereka yang selama ini dikenal sebagai aktifis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO). Wawancara akan ditujukan kepada Pengurus Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2002-2004 serta 2004-2006 juga Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) Cabang Yogyakarta Periode 2003-2004 serta 2004-2005.

4. Unit Analisis Data

Data yang di peroleh dalam penelitian ini akan di analisis dengan metode kualitatif, yaitu analisa yang ditujukan atau disajikan bukan dalam bentuk statistik, namun merupakan sajian data berupa analisa terhadap masing-masing variabel, mula-mula data yang diperoleh dibaca, di pelajari, ditelaah untuk kemudian diabtraksi. Abtraksi yaitu usaha membuat rangkuman inti pernyataan yang perlu di jaga sehingga tetap terjaga didalamnya.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is essential for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent data collection procedures and the use of advanced analytical techniques to derive meaningful insights from the data.

3. The third part of the document focuses on the role of technology in data management and analysis. It discusses how modern software solutions can streamline data collection, storage, and processing, thereby improving efficiency and accuracy.

4. The fourth part of the document addresses the challenges associated with data management, such as data quality, security, and privacy. It provides strategies to mitigate these risks and ensure that the data remains reliable and secure throughout its lifecycle.

5. The fifth part of the document concludes by summarizing the key findings and recommendations. It stresses the importance of a data-driven approach in decision-making and the need for continuous monitoring and improvement of the data management process.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah: Bab I berisi mengenai latar belakang penulis mengambil judul serta dilanjutkan dengan perumusan penelitian, tujuan penelitian, kerangka dasar teori, definisi konseptua, definisi operasional, metode penelitian dan terakhir sistematika ini.

Bab II berisi tentang sejarah pergerakan mahasiswa pasca kemerdekaan semenjak dari angkatan 66, angkatan 78, pada masa kebijakan NKK/BKK, angkatan 90-an, angkatan 98 serta pada masa reformasi, juga disertai dinamika pergerakan yang menyebabkan adanya polarisasi gerakan mahasiswa dari periodeisasi tersebut.

Bab III berisi tentang proses sejarah berdirinya KAMMI dan HMI-MPO baik dari segi gerakannya, pemikirannya serta struktur organisasinya.

Bab IV berisi persepsi KAMMI dan HMI-MPO terhadap Pemilu 2004, serta ditutup dengan BAB V berisi kesimpulan serta saran